

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aay Muh. Furkon, Bawono Kumoro, Inggrid Galuh Mustikawati, dan Maya Thatcher, *Penelitian Kebijakan Peningkatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat: Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan Undang-Undang* (Jakarta: The Habibie Center, Mei 2012) hal.25-26
- Abdul Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Sinar Grafika, Bandung
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Azhary, 1995. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsurunsurnya*. (Jakarta: UI Press, 1995) h.33
- Edy Suryono, *Op.Cit.*, hal.9.9 *Ibid.* 10 *Ibid.*, hal.11.11 *Ibid.*
- Frederick Julius Stahl, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Dalam Miriam Budihardjo, hlm.57-58
- Harsono, Boedi, 2007, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti Pers, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cet. 1 (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 402
- Noor, Asian, 2006, *Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia* (Jakarta: In-Hill Co., 1989), h.153
- Soeroso, R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Perundang-Undangan :
- Undang-undang Dasar 1945 Pasal 20A Ayat 1

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 : Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 : undang-undang tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jurnal :

Annisaresky, 2018, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketata Negara Indonesia*

Ervina, Rosida, 2021, *Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perspektif Asas Persamaan Di Hadapan Hukum*

Mohammad Muniri 2017, “Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR-RI Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014”, artikel ini diakses tanggal 20 maret 2018, vol. 18 No.1

Venie, Murtriyani, 2019, *Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia*